



# **RENCANA KERJA**

**TAHUN  
2024**

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara-teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

## BAB II

### RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## BAB III

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program*, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

## BAB V

### PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 kembali menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mempedomani Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dijabarkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 telah mengacu kepada nomenklatur program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Bangka Setara yang lebih nyaman untuk semua. Amin.

Sungailiat, 1 Agustus 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Bangka,



**Drs. H. ASEP SETIAWAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670504 199403 1 013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
1.1	Latar Belakang ..... 1
1.2	Landasan Hukum ..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan ..... 8
1.4	Sistematika Penulisan ..... 10
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 11
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 11
2.1.1	Realisasi Program /Sub Kegiatan/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan ..... 27
2.1.2	Realisasi Program /Sub Kegiatan/Kegiatan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan ..... 28
2.1.3	Realisasi Program/Sub Kegiatan/Kegiatan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja ..... 31
2.1.4	Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya /Melebihi Target Kinerja..... 34
2.1.5	Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra ..... 34
2.1.6	Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut .... 59
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 59
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 78
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD..... 81
2.5	Penelaahaan Usulan Program dan kegiatan masyarakat ..... 98
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ..... 99
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional ..... 99
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 102
3.3	Program dan Kegiatan ..... 104
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ..... 106
BAB V	PENUTUP



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan).....	13
Tabel 2.2	Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target .....	32
Tabel 2.3	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 .....	33
Tabel 2.4	Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2020 .....	35
Tabel 2.5	Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2022 .....	46
Tabel 2.6	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja .....	61
Tabel 2.7	Realisasi Kinerja Perangkat dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Tahun 2022 .....	61
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022 .....	65
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka .....	66
Tabel 2.10	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2022 .....	82
Tabel 2.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 .....	98
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD ....	103
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bangka .....	114

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Penyusunan forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan penjabaran dan kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan urusan Ketenagakerjaan, Urusan Perindustrian dan Perdagangan tahun sebelumnya.



Rencana Kerja OPD Rencana Kerja OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan anggaran. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan di urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan yang terintegrasi, efisien dan sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Pembangunan Jangka Menengah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);

29. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka disusun dengan dimaksud untuk dijadikan :

- a. Pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam menyusun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024;
- b. Alat koordinasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten Bangka, APBD Provinsi dan APBN (DAK, TP dan Dana Dekonsentrasi).
- c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan pembangunan yang efektif dalam rangka sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan data kinerja rencana strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinkerperindag ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinakerperindag selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan Penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada Tahun 2022 Anggaran Belanja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sebesar Rp. 29.167.897.670,00 dengan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan, mencakup 8 (Delapan) program, 16 (enam belas ) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut

terrealisasi keuangan sebesar Rp. 25.720.386.473,00 atau 88,18 persen. Dan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Rp. 4.463.176.500,00 dengan realisasi Rp. Rp. 4.544.769.500,00 atau 101,83 persen.

Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. Rp. 13.725.708.165 ,00 dan pendapatan sebesar Rp. 4.391.616.500,00 Untuk pelaksanaan 1 (satu) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pilihan, mencakup 10 (Sepuluh) Program dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 41 (Empat puluh satu) Sub Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian kinerja fisiknya.

Selanjutnya capaian evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)**  
**Kabupaten Bangka**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d/ dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023
										Target renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07					BIDANG URUSAN TENAGA KERJA		32.316.217.029,00	7.960.016.570,00	18.400.586.647,00	7.960.016.570,00	43,26%	
2	07	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		30.696.040.948,00	7.819.254.990,00	18.255.590.647,00	7.819.254.990,00	42,83%	
							Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	90.000.000,00	29.935.206,00	9.208.540.162	29.935.206,00	0,33%	
							Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	

							Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK RI (%)	20.611.666.823	4.745.101.645	6.098.773.425	4.745.101.645	77,80%	
							Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	668.283.800	9.740.000	9.800.000	9.740.000	99,39%	
							Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	5.224.272.350	1.759.033.748	1.767.106.140	1.759.033.748	99,54%	
							Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	4.101.817.975	1.265.444.391	1.161.370.920	1.265.444.391	108,96%	
2	07	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	90.000.000	29.935.206	30.000.000	29.935.206	99,78%	
							Persentase Pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	
2	07	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	45.000.000	29.935.206	30.000.000	29.935.206	99,78%	
2	07	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja yang disusun (laporan)	45.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	
2	07	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	20.611.666.823	4.745.101.645	6.098.773.425	4.745.101.645	77,80%	
							Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai standar (%)					0,00%	

2	07	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	20.611.666.823	4.745.101.645,00	6.098.773.425	4.745.101.645,00	77,80%	
							Jumlah laporan Keuangan yang disusun (laporan)	-	-	-	-	0,00%	
2	07	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	668.283.800	9.740.000	9.800.000	9.740.000	99,39%	
							Persentase Aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)					0,00%	
							Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)					0,00%	
2	07	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang tersedia (stell)	213.710.000	-	-	-	0,00%	
							Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	78.170.000	9.740.000	9.800.000	9.740.000	99,39%	
							Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia (stell)	158.400.000	-	-	-	0,00%	
2	07	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	218.003.800	-	-	-	0,00%	
2	07	01	2	06		Kegiatan Admisntrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	906.904.550	325.214.474	325.624.000	325.214.474	99,87%	
2	07	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	142.408.550	39.041.500	39.290.000	39.041.500	99,37%	



							Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani (bulan)	764.496.000	286.172.974	286.334.000	286.172.974	99,94%	
2	07	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	3.660.841.800	260.245.000	260.245.000	260.245.000	100,00%	
2	07	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	155.000.000	-	-	-	0,00%	
							Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	205.351.800	-		-	0,00%	
2	07	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	300.490.000	260.245.000	260.245.000	260.245.000	100,00%	
2	07	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan (unit)	3.000.000.000	-	-	-	0,00%	
2	07	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	4.101.817.975	1.265.444.391	1.161.370.920	1.265.444.391	108,96%	
							Persentase Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (%)			131.489.677		0,00%	
2	07	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani (bulan)	3.256.861.150	1.001.927.720	1.012.272.520	1.001.927.720	98,98%	
2	07	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Iar dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani (bulan)	368.043.525	115.460.571	131.489.677	115.460.571	87,81%	

2	07	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	22.900.000	-	-	-	0,00%	
2	07	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	454.013.300	148.056.100	149.098.400	148.056.100	99,30%	
2	07	01	2	09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik (%)</b>	<b>656.526.000</b>	<b>1.173.574.274</b>	<b>1.181.237.140</b>	<b>1.173.574.274</b>	99,35%	
2	07	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	355.020.000	141.302.274	143.557.140	141.302.274	98,43%	
2	07	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (paket)	51.316.000	22.622.000	22.630.000	22.622.000	99,96%	
2	07	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	250.190.000	1.009.650.000	1.015.050.000	1.009.650.000	99,47%	
2	07	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	-	-	-	-	0,00%	
2	07	03				<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)</b>	<b>768.744.788</b>				0,00%	
2	07	03	2	01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang kompeten</b>	<b>768.744.788</b>		-		0,00%	
2	07	03	2	01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi (orang)	768.744.788	-		-	0,00%	
2	07	04				<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)</b>	<b>286.544.293</b>	<b>82.127.738</b>	<b>84.996.000</b>	<b>82.127.738</b>	96,63%	

2	07	04	2	03		Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	286.544.293	60.886.500	63.323.000	60.886.500	96,15%	
2	07	04	2	03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Lowongan Pekerjaan yang diakses Pencaker	143.672.113	60.886.500	63.323.000	60.886.500	96,15%	
							Jumlah Dokumen RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah)			-		0,00%	
2	07	04	2	03	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	142.872.180		-		0,00%	
2	07	04	2	05		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja daam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Bangka	64.801.938	21.241.238	21.673.000	21.241.238	98,01%	
2	07	04	2	0	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang terdata	64.801.938	21.241.238	21.673.000	21.241.238	98,01%	
2	07	05				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	564.887.000	58.633.842	60.000.000	58.633.842	97,72%	
2	07	05	2	01		Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	118.528.000	19.350.000	20.000.000	19.350.000	96,75%	

2	07	05	2	01	01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah PP (Peraturan Perusahaan) yang disahkan di Dinakerperindag	38.500.000	-		-	0,00%	
2	07	05	2	01	02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang didaftarkan di Dinakerperindag	-	-		-	0,00%	
2	07	05	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan Sarana Hubungan Industrial	80.028.000	19.350.000	20.000.000	19.350.000	96,75%	
2	07	05	2	02		<b>Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)</b>	<b>446.359.000</b>	<b>39.283.842</b>	<b>40.000.000</b>	<b>39.283.842</b>	<b>98,21%</b>	
2	07	05	2	02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesain Kasus Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi	149.733.000	39.283.842	40.000.000	39.283.842	98,21%	
2	07	05	2	02	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) yang dilakukan Verifikasi	97.168.000	-	-	-	0,00%	
2	07	05	2	02	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saran dan Masukan terhadap permasalahan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan Rapat LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit	199.458.000	-	-	-	0,00%	

3	30					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERDAGANGAN		15.971.310.325	2.641.877.745	3.375.947.000	2.641.877.745	78,26%	
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan (%)	350.000.000		-		0,00%	
3	30	02	2	01		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi izin Perdagangan (%)	350.000.000		-		0,00%	
3	30	02	2	01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	Data Pelaku Usaha Perdagangan yang Mendapatkan Izin	350.000.000	-	0,00	-	0,00%	
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif	14.582.546.500		3.232.947.000		0,00%	
							Persentase Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	2.522.009.902		2.522.009.902	0,00%	
3	30	03	2	01		Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	-				0,00%	
							Persentase pencapaian Target penerimaan retribusi sarana distribusi Perdagangan	14.582.546.500	2.522.009.902	3.232.947.000	2.522.009.902	0,00%	
							Persentase Peningkatan Pasar Rakyat yang menggunakan E-Money					0,00%	



3	30	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/ruko/kios/los/toko dan gudang yang dibangun	7.000.000.000		-		0,00%	
							Jumlah Pedagang yang menerima bantuan sarana dan prasarana perdagangan	200.000.000		-		0,00%	
3	30	03	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelayanan UPT Pasar	7.382.546.500	2.522.009.902	3.232.947.000	2.522.009.902	78,01%	
							Jumlah Pasar Yang menerapkan Pembayaran Retribusi Berbasis E- Money	0,00		-		0,00%	
3	30	04				<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok &amp; Barang penting</b>	<b>559.854.050</b>	<b>52.833.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>52.833.000</b>	<b>78,86%</b>	
							<b>Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok &amp; Barang penting</b>					<b>0,00%</b>	
3	30	04	2	02		<b>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio terlaksananya monitoring/pemantauan harga dan stok Bapokting pada Pelaku Usaha perdagangan</b>	<b>559.854.050</b>	<b>52.833.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>52.833.000</b>	<b>78,86%</b>	
3	30	04	2	02	01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Data Harga Bapokting	342.613.000	40.340.000	42.000.000	40.340.000	96,05%	
							Data Stok Bapokting	0,00		-		0,00%	
3	30	04	2	02	02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Data Harga Bapokting	0,00		-		0,00%	
							Data Stok Bapokting	0,00		-		0,00%	

3	30	04	2	02	03	Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang Dilakukan	217.241.050	12.493.000	25.000.000	12.493.000	49,97%	
3	30	06				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	478.909.775	67.034.843	76.000.000	67.034.843	88,20%	
3	30	06	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran UTTP (%)	478.909.775	67.034.843	76.000.000	67.034.843	88,20%	
3	30	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera , Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	366.081.775	62.479.843,00	66.000.000	62.479.843,00	94,67%	
3	30	04	2	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pemilik UTTP yang mendapatkan pengawasan dan penyuluhan Metrologi legal	112.828.000	4.555.000,00	10.000.000	4.555.000,00	45,55%	
3	31					URUSAN PEMERINATAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		3.737.703.200	15.118.492.158	16.438.414.508	15.118.492.158	91,97%	-
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	-		-		0,00%	
							Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	3.647.703.200	15.109.808.158	16.408.674.508	15.109.808.158	92,08%	
3	31	02	2	01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu produk IKM	3.647.703.200	-	16.408.674.508	-	0,00%	
							Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi					0,00%	

							Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat teknis dan manajerial						0,00%	
							Nilai Produksi IKM						0,00%	
							Persentase Pelaku IKM yang mendapat fasilitas promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan						0,00%	
							Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan fasilitas pengembangan produk						0,00%	
							Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM						0,00%	
							Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat teknis dan manajerial						0,00%	
							Nilai Produksi IKM (juta rupiah)						0,00%	
							Persentase Pelaku IKM yang mendapat fasilitas promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan						0,00%	
							Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan fasilitas pengembangan produk						0,00%	

							<b>Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM</b>			<b>16.408.674.508</b>		0,00%	
3	31	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi	300.000.000	-	-	-	0,00%	
3	31	02	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen perencanaan (DED) yang disusun	151.800.000	-	-	-	0,00%	
3	31	02	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis teknis dan manajerial	1.293.691.400	-	16.408.674.508	-	0,00%	
							Jumlah Sarana dan prasarana yang difasilitasi kepada IKM	-	-		-	0,00%	
							Jumlah Modal awal yang difasilitasi kepada WUB	400.000.000	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran	653.952.000	-		-	0,00%	
							Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Temu usaha dan kompetisi produk inovatif dan kreatif	200.000.000	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapaFasilitas Bimbingan	-	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapat bantuan desain kemasan	-	-		-	0,00%	

							Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas bimbingan dan sertifikat merek	86.206.400	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapat Sertifikat GMP	300.000.000	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapat Sertifikat Uji Nutrisi	150.000.000	-		-	0,00%	
							Jumlah produk IKM yang diawasi BTPnya	112.053.400	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat Halal	-	-		-	0,00%	
							Jumlah IKM yang mendapat OVOP	-	-		-	0,00%	
3	31	02	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan sumberdaya industri dan peran serta masyarakat	1.293.691.400	15.109.808.158	16.408.674.508	15.109.808.158	92,08%	
3	31	03				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM</b>	<b>90.000.000</b>		-	-	-	
3	31	03	2	01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Pelaku IKM yang mendapat Fasilitas Promosi, Pemasaran dan hubungan kemitraan	90.000.000		-	-	-	



3	31	03	2	01	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data melalui SIINAS	90.000.000	-	-	-	0,00%	
3	31	04				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM</b>	<b>330.724.250</b>	<b>8.684.000</b>	<b>29.740.000</b>	<b>8.684.000</b>	29,20%	
3	31	04	2	01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Lapran melali SIINAS	330.724.250	8.684.000	29.740.000	8.684.000	29,20%	
3	07	19	2	01	02	Sub kegiatan Desiminasi, Publikasi Data informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data melalui SIINAS	330.724.250	8.684.000	29.740.000	8.684.000	29,20%	
JUMLAH .....									25.720.386.473	38.214.948.155	25.720.386.473		

Terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2022, sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan :**

Pada Tahun 2022 Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja  
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online;
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat;
4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  
Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang dampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

#### 5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang;
- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

#### **2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan :**

Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sebanyak Program 8 (delapan), Kegiatan 15 (Lima belas, Sub Kegiatan 23 (dua puluh tiga) dan dapat mencapai 100% dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan IV antara lain sebagai berikut:

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasi
6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

**Program Penempatan Tenaga Kerja** terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online

2. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

**Program Hubungan Industrial** terdiri dari :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



**Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** terdiri dari :

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, tera Ulang dan Pengawasan
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, Tera Ulang

**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Desiminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS.

#### **2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja**

Tahun 2022 program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	24 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen	24 Dokumen
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen	40 Dokumen
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	33 TKA	53 TKA
<b>3.</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>		
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6 Perusahaan	17 Perusahaan

4.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Infromasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	10 Perusahaan	22 Perusahaan

**Tabel 2.3**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	<b>4.463.176.500,00</b>	<b>4.544.769.500,00</b>	<b>101,83</b>
Hasil Retribusi Daerah	<b>4.463.176.500,00</b>	<b>4.544.769.500,00</b>	<b>101,83</b>
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	162.900.000,00	135,75
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.383.766.000,00	1.483.768.000,00	107,23
- Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakkan	1.150.000.000,00	1.069.989.000,00	93,04
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.715.810.500,00	1.715.816.500,00	100,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	93.600.000,00	112.296.000.000	119,97

#### **2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/~~Melebihi~~ Target Kinerja**

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya/~~melebihi~~ target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Terdapat beberapa program yang ditunda pelaksanaannya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022. Selanjutnya capaian atas kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinakerperindag tahun 2024 dan melakukan upaya-upaya seperti anggaran kedepan perlu dipacu target yang tidak tercapai sehingga diakhir renstra target bisa tercapai dengan mengupayakan jemput bola penggunaan pendanaan dari APBN, DAK sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Bangka.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra**

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2019-2023 secara keseluruhan program dan Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2020**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019		Target 2020		Realisasi 2019		Realisasi 2020		Capaian sampai 2020
		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	
Meningkatnya akuntabilitas Dinakerperindag	Nilai Evaluasi AKIP						73,98			
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Layanan Adminstrasi Kantor Yang tertangani (%)</b>	<b>4.230.128.850</b>	<b>80</b>	<b>3.319.780.600</b>	<b>80</b>	<b>4.004.378.320</b>	<b>80</b>	<b>3.186.941.616</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Tertib Penatausahaan persuratan yang tertangani Surat Menyurat (Bulan)	880.975.500	12	953.931.000	12	864.260.318	12	948.052.313	12	<b>100</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlaj Layanan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kantor (Bulan)	96.597.500	12	139.765.500	12	68.268.567	12	89.746.167	12	<b>100</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara (Bulan)	21.300.000	12	18.950.000	12	21.300.000	12	18.450.000	12	<b>100</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Bulan)	115.420.000	12	103.980.000	12	90.584.488	12	92.730.712	12	<b>100</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Yang tertangani (Bulan)	140.055.500	12	153.007.000	12	140.028.000	12	152.953.360	12	<b>100</b>



Kegiatan Monev Program, Kegiatan dan Aset Dinakerperindag	Jumlah Monev program, kegiatan adan aset yang ditangani (Bulan)	-	0	-	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultaasi Keluar Daerah	268.955.350	12	98.259.600	12	268.955.350	12	98.089.929	12	100
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Layanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah yang tertangani(Bulan)	86.800.000	12	67.625.000	12	84.930.000	12	67.502.000	12	100
Kegiatan Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Sungailiat	Jumlah Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Sungailiat yang tertangani (Bulan)	2.030.833.500	12	0	0	2.002.545.183	12	0	0	50
	Jumlah Pelayanan UPT Pasar Sungailiat yang tertangani	0	0	1.784.262.500	12	0	0	1.719.417.135	12	50
Kegiatan Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Belinyu	Jumlah Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Belinyu yang tertangani (Bulan)	589.191.500	12	0	0	463.506.414	12	0		50
	Jumlah Pelayanan UPT pasar Belinyu yang tertangani	-	0	595.711.500	12	0	0	455.444.839	12	50
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)</b>	<b>505.475.000</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>494.365.818</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia (paket)	149.240.000	1	0	0	148.633.000	1	0	0	50
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (paket)	252.335.000	1	0	0	247.730.743	1	0	0	50
Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (paket)	58.600.000	1	0	0	52.912.000	1	0	0	50
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia (unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Rehab Sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jmlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkal (unit)	45.300.000	1	0	0	45.090.075	1	0	0	50
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>% Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>46.300.000</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>42.300.000</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Kegiatan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang tersedia (stel)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia (stel)	9.800.000	16	0	0	9.800.000	16	0	0	50
	Jumlah Pakaian adat (stel)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pakaian Tradisional (Batik Cual) yang tersedia (stel)	36.500.000	73	0	0	32.500.000	65	0	0	45
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>60.000.000</b>	<b>80</b>	<b>20.145.700</b>	<b>80</b>	<b>41.108.980</b>	<b>80</b>	<b>20.145.679</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek (orang)	60.000.000	6	20.145.700	4	41.108.980	6	20.145.679	5	113
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pelaporan Keuangan dan Kinerja tepat waktu (%)</b>	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	100
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	15.000.000	13	15.000.000	10	15.000.000	14	15.000.000	8	94
	Jumlah Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan				2				24	
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah</b>	<b>Informasi Hasil Pembangunan Daerah Tepat Waktu (%)</b>	10.000.000	80	0	-	9.955.000	80	0	0	50
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah	Pawai Budaya dan Kendaraan Hias (kali)	10.000.000	2	0	2	9.955.000	2	0	0	50
<b>Meningkatnya Kesempatan kerja</b>	<b>Persentase Tingkat Kesempatan Kerja</b>		68,16		68,16		96,20		94,58	140
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten</b>	0	24,95	32.915.200	26,17	0	0	32.268.200	0	0
	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina</b>	0	23,81	18.150.000	26,15	0	0	15.490.000	50,00	96
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Jumlah LPKS	0	0	18.150.000	25	0	0	15.490.000	10	20
Kegiatan Pelatihan Elektronik (Refrigerasi Dasar)	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	32.915.200	20	0	0	32.268.200	0	0

<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>68.625.200</b>	<b>33,33</b>	<b>41.590.000</b>	<b>34,91</b>	<b>68.429.230</b>	<b>19</b>	<b>40.820.000</b>	<b>106,60</b>	<b>181</b>
Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Data Informasi Bursa Tenaga Kerja (Buku)	48.275.200	12	27.345.000	10	48.184.230	10	27.325.000	10	92
Kegiatan Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Laporan Monitoring Pencari Kerja yang ditempatkan (Buku)	-	0	-		0	0	0		0
Kegiatan Penyusunan Database Pencari Kerja	Jumlah Kartu Pencari kerja yang diterbitkan (Kartu pencari Kerja)	-	0	0		0	0	0		0
	<b>Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan</b>		<b>54,17</b>	<b>14.245.000</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>35,29</b>	<b>13.495.000</b>	<b>106,60</b>	<b>128</b>
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pendataan IMTA-TKA/Pelaporan	Data jumlah TKA dalam satu wilayah (TKA)	20.350.000	30	14.245.000	30	20.245.000	17	13.495.000	32	82
<b>Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja</b>	<b>Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja</b>	<b>-</b>	<b>47,89</b>		<b>49,30</b>	<b>0</b>	<b>47,89</b>		<b>49,30</b>	<b>100</b>
<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Perusahaan yang membuat &amp; mengesahkan peraturan perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan</b>	<b>93.047.000</b>	<b>28,38</b>	<b>46.480.000</b>	<b>31,94</b>	<b>91.975.150</b>	<b>28,38</b>	<b>46.265.000</b>	<b>31,94</b>	<b>100</b>
Kegiatan Forum Komunikasi Ketenagakerjaan LKS (Lembaga Kerjasama Tripartit)	Pelaksanaan Sidang LKS Tripartit di Kabupaten Bangka (Dokumen)	41.100.000	4,00	-	4,00	40.185.000	4	0	0	50

Kegiatan Pembinaan Sarana HI	Laporan pembinaan Sarana HI (1 Laporan 15 perusahaan)	17.796.500	1,00	12.820.000	1,00	17.706.500	1	12.655.000	1,00	100
Kegiatan Pemetaan Tingkat kerawanan HI	Laporan Pemetaan Tingkat Kerawanan HI (15 Perusahaan)	-	0	12.535.000	1,00	0	0	12.530.000	1,00	50
Kegiatan Pendataan dan verifikasi Keanggotaan Serikat Kerja/Serikat Buruh	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terverifikasi keanggotaannya	-	0	-	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Monitoring Penerapan Upah Minimum di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>34.150.500</b>	<b>53,33</b>	<b>21.125.000</b>	<b>60,00</b>	<b>34.083.650</b>	<b>70,83</b>	<b>21.080.000</b>	<b>73,07</b>	<b>127</b>
Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui PB dan Anjuran	34.150.500	8,00	21.125.000	10,00	34.083.650	17	21.080.000	24	226
<b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB</b>	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	-	22,56	-	22,58	0	21,23	0	21,57	95
<b>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>	<b>Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM</b>	<b>23.843.500</b>	<b>23,40</b>	<b>2.964.235.000</b>	<b>24,96</b>	<b>22.000.500</b>	<b>25</b>	<b>2.862.674.506</b>	<b>24,96</b>	<b>103</b>
Kegiatan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitas Pengujian Kadaluaarsa Produk Pangan	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek,Uji Nutrisi serta Kadaluaarsa Pangan	-	0	0		0	0	0		0

Kegiatan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi Uji Nutrisi Produk Pangan	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek, Uji Nutrisi serta Kadaluarsa Pangan	-	0	0		0	0	0		0
Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi HKI	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat merek dan desain industri	-	0	0		0	0	0		0
Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi Kemasan Produk	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek, Uji Nutrisi serta Kadaluarsa Pangan	-	0	0		0	0			0
Kegiatan Pedampingan IKM Pangan melalui penyediaan bahan tambahan pangan	Jumlah produk industri yang diawasi penggunaan Bahan Tambahan Pangannya	-	0	0		0	0	0		0
Kegiatan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan pada Kualitas Produk IKM Pangan	Jumlah produk industri yang diawasi penggunaan Bahan Tambahan Pangannya (sampel IKM Pangan)	23.843.500	1	450.000	1	22.000.500	1	450.000	0	50
Kegiatan Pembangunan Pusat Industri Kerajinan				903.430.000	1	0	0	896.421.566	1	50
Kegiatan Rehabilitasi Galeri				202.485.000	1	0	0	201.477.000	1	50
Kegiatan Penataan Halaman Galeri				202.485.000	1	0	0	200.358.000	1	50
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Galeri				451.735.000	1	0	0	428.467.000	1	50

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk pusat dan Perlengkapan Pusat Industri Kerajinan				1.001.960.000	1	0	0	944.904.640	1	50
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi				201.690.000	1	0	0	190.596.300	1	50
<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Persentase IKM Terlatih terhadap Jumlah IKM</b>	<b>803.871.000</b>	<b>2,58</b>	<b>-</b>	<b>15,46</b>	<b>1.034.420.405</b>	<b>3,74</b>	<b>0</b>	<b>6,97</b>	<b>95</b>
Kegiatan Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman dari Lidi Kelapa	Jumlah IKM yang dilatih	66.731.000	20	0	0	63.060.655	20	0		50
Kegiatan Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) pada IKM Pangan	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat GMP	737.140.000	115		25	617.448.602	147	0	0	64
Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan IKM melalui Magang SDM Pelaku industri	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0		0	0	0	0		0
Kegiatan Pendampingan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman dari Daun Pandan	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0		0	0	0	0		0
Kegiatan Pendampingan IKM melalui fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang mendapat pemberian informasi pasar	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Pedampingan IKM melalui bimtek diversifikasi produk olahan hasil perkebunan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Pedampingan IKM melalui bimtek diversifikasi produk olahan hasil pertanian	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0



Kegiatan Pendampingan IKM kerumah produksi olahan jamur dan olahan buah segar	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku nanas	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku buah-buahan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku sayuran	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0		0	0	0		0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku jamur	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk kerajinan berbahan baku potensi SDA	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Bimtek Diversifikasi produk kerajinan anyaman dari daun pandan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita / Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Wanita/Perempuan di Perdesaan yang dilatih (IKM Perempuan Perdesaan)	-	0	0	0	0	0	0		0
	<b>Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM</b>	<b>363.100.000</b>	<b>14,12</b>	<b>371.215.000</b>	<b>15,46</b>	<b>0</b>	<b>13,18</b>	<b>354.858.700</b>	<b>15,71</b>	<b>97</b>
Kegiatan Partisipasi Pameran keluar Daerah		363.100.000	5	8.900.000	5	353.911.148	7	890.000	0	70

Kegiatan Pelatihan Good Manufacturing Practise (GMP) pada IKM Pangan		-	0	0	25		0	0	0	0
Kegiatan Sertifikat Halal Produk IKM		-	0	362.315.000	80		0	353.968.700	80	50
<b>Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial</b>	<b>Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan sentra industri potensial</b>	<b>22.645.000</b>	<b>33,33</b>	<b>35.000.000</b>	<b>15,46</b>	<b>20.925.000</b>	<b>33</b>	<b>34.865.000</b>	<b>15,71</b>	<b>51</b>
Kegiatan Pendataan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan data Industri	Buku Data Industri dan Laporan Informasi Industri (Buku)	22.645.000	10	35.000.000	25	20.925.000	10	34.865.000	25	100
<b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	<b>Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	<b>-</b>	<b>13,78</b>	<b>0</b>	<b>14,19</b>	<b>0</b>	<b>14,17</b>	<b>0</b>	<b>13,08</b>	<b>98</b>
<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Penurunan pelanggaran Alat UTTP (%)</b>	<b>1.445.255.000</b>	<b>33,39</b>	<b>177.460.000</b>	<b>26,50</b>	<b>1.219.798.122</b>	<b>5,05</b>	<b>174.495.200</b>	<b>25,76</b>	<b>56</b>
Kegiatan Pelayanan dan Kepengembangan Kemetrolgian	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	147.764.000	2000	8.950.000	700	143.468.122	1.889	8.280.000	738	100
Kegiatan Kajian naskah akademis dan penyusunan raperda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang	Jumlah Naskah dan Raperda retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	-	2	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian (DAK)	Jumlah Peralatan Metrologi Legal yang sesuai standar (Paket)	1.271.691.000	1	0	0	1.050.550.000	1	0	0	50
Kegiatan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	Jumlah Peralatan san Sarana Penunjang Tera/Tera Ulang	-	0	167.560.000	1	0	0	165.265.200	1	50

Kegiatan Pembelian Kendaraan Operasional kemetrolagian (DAK)	Jumlah Kendaraan operasional Metrologi Legal yang sesuai standar(Paket)	-	1	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pembangunan Gedung Kemetrolagian (DAK)	Jumlah Gedung Metrologi yang dibangun/Rehab (Unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Penurunan Peredaran Barang dan jasa yang tidak sesuai standar (%)</b>	-	0	0	0	0		0	0	0
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang yang diawasi di Kabupaten Bangka (jenis)	25.800.000	37	950.000	37	25.780.000	37	950.000	0	50
	<b>Peningkatan Promosi Produk Perdagangan (%)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Peningkatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam Pameran (kali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Ketersediaan Kebutuhan pokok sampai di tingkat pasar kecamatan (%)</b>	<b>61.075.000</b>	<b>87,50</b>	<b>1.246.825.000</b>	<b>87,50</b>	<b>58.885.000</b>	<b>87,50</b>	<b>1.226.002.000</b>	<b>91,60</b>	<b>102</b>
	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif</b>	<b>61.075.000</b>	<b>83,33</b>	<b>1.246.825.000</b>	<b>83,33</b>	<b>0</b>	<b>83,33</b>	<b>0</b>	<b>36,88</b>	<b>72</b>
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Informasi Ketersediaan dan Distribusi barang kebutuhan pokok	Laporan stok barang dan laporan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (dok)	44.050.000	20	42.555.000	23	41.860.000	20	40.935.000	23	100
Kegiatan Pelaksanaan Pasar murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (kali)	17.025.000	5	0	0	17.025.000	5	0	0	50

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Kuliner	Jumlah Pasar/Ruko/Los /Tempat /Kuliner/Galeri yang representatif	0	0	1.003.580.000	1	0	0	989.977.000	1	50
Kegiatan Pengadaan Prasarana Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan Prasaran Perdagangan	0	0	200.690.000	1	0	0	195.090.000	1	50

**Tabel 2.5**  
**Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2022**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021		Target 2022		Target 2023		Realisasi 2021		Realisasi 2022		Capaian sampai 2022
		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		74,00		74,25		74,50		74,62		73,86	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15.000.000	28,00	30.000.000	28,30	49.995.000	28,50	14.997.500	25,07	29.935.206	24,23	88
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15.000.000	11,00	10.000.000	11,20	13.665.000	11,45	15.000.000	11,05	10.000.000	11,25	100

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	15.000.000	100	30.000.000	100	49.995.000	100	14.997.500	100	29.935.206	100	100
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	15.000.000	100	10.000.000	100	13.665.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	15.000.000	8	30.000.000	6	37.355.000	6	14.997.500	10	29.935.206	6	113
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	15.000.000	24	10.000.000	12	8.545.000	4	15.000.000	32	10.000.000	24	167
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	0	0	0	3.160.000	5	0	0	0	24	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	24	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	24	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	24	0
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0	5.120.000	8	0	0	0	24	0
	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK RI	5.707.590.785	0	6.098.773.425	0	6.962.565.425	0	4.728.369.611,60	0	4.745.101.645	0	0

Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Kinerja yang disusun Sesuai standar	5.707.590.785	100	6.098.773.425	100	36.600.000	100	4.728.369.611,60	100	4.745.101.645	100	100
	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai standar		100		100		100		100		100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	5.707.590.785	12	6.098.773.425	12	6.925.965.425	48	4.728.369.611,60	12	4.745.101.645	12	100
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		2		38		0		2		40	103
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	0	0	24.840.000	12	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	0	0	5.880.000	2	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0	0	0	5.880.000	40	0	0	0	0	0
	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	0	63,49	9.800.000	63,70	112.750.000		0	0,00	9.740.000	0,00	0
Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	0	100,00	9.800.000	100	12.750.000		0	0,00	9.740.000	0	0

	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	7,55	0	0	100.000.000		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	0	0	9.800.000	16	9.750.000	1	0	0	9.740.000	16	50
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adminsrasi Kepegawaian		0	0	0	0	3.000.000	11	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	0	0	0	0	100.000.000	20	0	0	0	0	0
	<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>389.470.000</b>	<b>0,90</b>	<b>1.767.106.140</b>	<b>95</b>	<b>647.515.747</b>		<b>386.616.408</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.033.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>212.450.000</b>	<b>90</b>	<b>325.624.000</b>	<b>90</b>	<b>369.988.197</b>	<b>70</b>	<b>211.658.771</b>	<b>90</b>	<b>325.214.474</b>	<b>95</b>	<b>103</b>
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	212.450.000	12	325.624.000	12	363.988.197	12	211.658.771	12	325.214.474	12	100
	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani											0
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	0	0	3.000.000	12	0	0	0	0	0



Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	0	0	3.000.000	12	0	0	0	0	0
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>260.245.000</b>	<b>90</b>	<b>86.340.410</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>260.245.000</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0	260.245.000	1	0	0	0	0	260.245.000	1	50
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		0	0	0	0	31.109.750	1					0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	55.230.660	1					0
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>177.020.000</b>	<b>90</b>	<b>1.181.237.140</b>	<b>90</b>	<b>191.187.140</b>	<b>100</b>	<b>174.957.637</b>	<b>90</b>	<b>1.173.574.274</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	0	0	22.630.000	1	22.630.000	1		0	22.622.000	1	50
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	107.920.000	4,&14	143.557.140	4&14	143.557.140	4&14	106.350.637	2 &1	141.302.274	2 & 5	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	69.100.000	1	1.015.050.000	1	25.000.000	1	68.607.000	1	1.009.650.000	1	100

	<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>1.264.813.961</b>	<b>0,60</b>	<b>1.292.860.597</b>	<b>60</b>	<b>1.312.995.448</b>	<b>100</b>	<b>1.237.877.991</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.444.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>1.105.070.480</b>	<b>100</b>	<b>1.161.370.920</b>	<b>100</b>	<b>1.189.430.360</b>	<b>100</b>	<b>1.102.155.010</b>	<b>100</b>	<b>1.149.983.820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>	<b>159.743.481</b>	<b>100</b>	<b>131.489.677</b>	<b>3</b>	<b>123.565.088</b>	<b>100</b>	<b>135.722.981</b>	<b>100</b>	<b>115.460.571</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	936.903.180	12	1.012.272.520	12	1.040.389.660	12	934.078.090	12	1.001.927.720	12	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	159.743.481	12	131.489.677	12	123.565.088	12	135.722.981	12	115.460.571	12	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	16.880.000	1	0	12	0	0	16.871.500	1	0	0	50
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	151.287.300	12	149.098.400	12	149.040.700	12	151.205.420	12	148.056.100	12	100
<b>Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah</b>	<b>Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>23,84</b>		<b>31,77</b>		<b>32,15</b>		<b>31,57</b>		<b>30,11</b>	<b>114</b>
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja</b>	<b>Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>0</b>	<b>8,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.746.800</b>	<b>8,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi</b>	<b>Rasio Calon Tenaga Kerja yang kompeten</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	0		0	0	117.746.800	5,30	0		0	0	0
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Calon Tenaga kerja yang mendapatkan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	0	0	0	0	117.746.800	30	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>% Pencari Kerja yang ditempatkan</b>	<b>33.730.600</b>	<b>32,65</b>	<b>123.323.000</b>	<b>32,90</b>	<b>157.265.000</b>	<b>32,95</b>	<b>25.649.000</b>	<b>70,59</b>	<b>82.127.738</b>	<b>15,96</b>	<b>132</b>
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rasio Informasi Lowongan pekerjaan yang diakses pencari kerja	21.180.600	0,33	0	0	0		15.959.000	1,43	0	0	267
	Persentase Informasi Lowongan kerja yang diakses Pencaker	0	0,00	63.323.000	45	132.445.000	52,00			60.886.500	45	50
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang diakses pencari kerja	21.180.600	7	63.323.000	9	132.445.000	265 10 100	15.959.000	10	60.886.500	9	121
	Jumlah Dokumen RTKD		1		1				0		1	50
	<b>% TKA yang terdata</b>	12.550.000	21,42	0	0	0		9.690.000	4,26	0	0	10
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab. Bangka	Rasio Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	12.550.000	0,18	0	0	0		0	0,44	0	0	122

	Jumlah Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	60.000.000	11	24.820.000	13	0	0	21.241.238	6	27
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah TKA yang terdata	12.550.000	33	21.673.000	33	24.820.000	35	9.690.000	47	21.241.238	53	152
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	% Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	64.565.300	50,70	60.000.000	52,11	177.356.000	53,52	62.490.300	51,40	58.633.842	52,11	101
Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	0	0,00	60.000.000	39,71	53.074.410	43,94	0	0,00	19.350.000	39,71	50
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan Sarana HI	0	0	20.000.000	6	20.550.000	40	0	0	19.350.000	17	142
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		0		0	0	32.524.410	7	0	0	0	0	0

Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	0	62,50	40.000.000	62,50	124.281.590	62,50		58,30	39.283.842	62,50	97
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Mediasi	16.685.300	16	40.000.000	16	45.507.590	16	16.440.500	12	39.283.842	16	88
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Reakipitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah SP/PB (Serikat Kerj/Serikat Buruh) yang dilakukan verifikasi	12.300.000	14	0	0	20.000.000	2 10	11.025.400	14	0	0	50
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saran dan masukan terhadap permasalahan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan rapat LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit	35.580.000	4	0	0	58.774.000	1	35.024.400	5	0	0	63

Meningkatnya Kontribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB		22,58		22,62		22,64		24,22		26,01	111
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk IKM	212.950.650	0,00	16.408.674.508	15,83	0	16,00	200.530.069	0,00	15.109.808.158	15,83	50
	% Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM		25,33		25,33	1.229.861.365	28,99		18,38		18,38	73
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	% Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM	0	1,70	16.408.674.508	2,77	1.229.861.365	3,65		0,77	15.109.808.158	0,83	38
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis teknis manajerial	61.150.650	25	0	0	0	0	59.137.860	25	0	0	50
	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0	0	16.408.674.508	13	1.229.861.365	8			15.109.808.158	12	46
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen DED perencanaan kontruksi	151.800.000	1	0	0	0	0	141.392.209	1	0	0	50

<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>% Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.500</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri 9IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan izin Perluasan Kawasan Industri 9IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	% Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	0	0,00	0	0,00	10.472.500	15,60	0	0,00	0	0,00	0
Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data melalui SIINAS	0	0	0	0	10.472.500	30	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>% Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM</b>	<b>23.002.500</b>	<b>15,63</b>	<b>29.740.000</b>	<b>15,83</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16,00</b>	<b>22.817.500</b>	<b>12,16</b>	<b>8.684.000</b>	<b>15,83</b>	<b>89</b>
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan	% pelaku IKM yang mendapat fasilitas promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan	0	15,37	29.740.000	36,84	0	0	0	40,74	8.684.000	70,97	229



kabupaten/Kota`	% Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	0	0,00	0	0	16.000.000	15,60	0	0,00	0	0	0
Sub kegiatan Desiminasi, Publikasi Data informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data melalui SIINAS	23.002.500	15	29.740.000	10	16.000.000	3	22.817.500	20	8.684.000	22	177
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		14,32		14,51		14,68		12,29		13,13	88
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.998.262.900	95,00	0	0			1.956.825.214	95,00	0	0	50
	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif	0	0,00	3.232.947.000	80	2.614.519.880		0	0,00	2.522.009.902	80,00	50
Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	% pencapaian Target penerimaan retribusi sarana distribusi Perdagangan	0	100	3.232.947.000	100	2.614.519.880		0	104	2.522.009.902	101,83	103
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelayanan UPT Pasar	1.998.262.900	12	3.232.947.000	12	2.614.519.880		1.956.825.214	12	2.522.009.902	12	100
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	49.094.050	95,00	67.000.000	95	157.000.000		43.720.500	95,00	52.833.000	95	100
	Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting		95,00		95				95,00		95	100

Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan brang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Rasio terlaksananya monitoring/pemantaua n harga dan stok Bapokting pada Pelaku Usaha perdagangan	49.094.050	0,95	67.000.000	0.95	157.000.000			0,95	52.833.000	0.95	50
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Data Harga Bapokting	37.613.000	1	42.000.000	1	84.000.000		35.865.000	1	40.340.000	1	100
	Data Stok Bapokting											0
Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang dilakukan	11.481.050	2	25.000.000	2	73.000.000		7.855.500	2	12.493.000	2	100
<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Alat standar tera/tera ulang</b>	<b>53.759.775</b>	<b>65,00</b>	<b>76.000.000</b>	<b>75</b>	<b>146.000.000</b>	<b>100</b>	<b>47.784.224</b>	<b>53,13</b>	<b>67.034.843</b>	<b>81,75</b>	<b>95</b>
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	% Penurunan Pelanggaran UTP	53.759.775	65,00	76.000.000	75	146.000.000	100	47.784.224	14,48	67.034.843	81,75	66
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTP yang ditera/tera ulang	47.774.775	1.500	66.000.000	1.650	124.000.000	1.800	46.154.224	863	62.479.843	1.351	70
Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pemilik UTP yang mendapatkan pengawasan dan penyuluhan Metrologi legal	5.985.000	20	10.000.000	50	22.000.000	100	1.630.000	363	4.555.000	35	943

### **2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Berdasarkan uraian pada sub 2.1.3 Kinerja Dinakerperindag sampai dengan Akhir Tahun 2022 dapat mencapai target dan ada juga yang melebihi target dan untuk kedepannya agar Dinakerperindag dapat :

1. Mempertahankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja;
2. Tetap Melaksanakan koordinasi antar sektor terkait;
3. Dengan anggaran yang tersedia bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati didalam dokumen perencanaan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja	Realisasi	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST	ST
76 % ≤ 90% <sup>2</sup>	Tinggi	T	T
66% ≤ 75%	Sedang	S	S
51% ≤ 65%	Rendah	R	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR	SR

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Kinerja Perangkat dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Tahun 2022**

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori *)	Persentase Capaian Keuangan	Kategori *)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	ST	84,91%	T
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48,51%	R	96,63%	ST
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100,00%	ST	97,72%	ST
4.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100,00%	ST	92,08%	ST
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100,00%	ST	29,20%	R
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100,00%	ST	78,01%	T
7.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100,00%	ST	78,86%	T
8.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	109,00%	ST	88,20%	T

Dari tabel diatas menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja

sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 84,91% dengan Kategori Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja untuk skala kinerjanya 48,51% dengan kategori Rendah dengan Realisasi Keuangan 96,63% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka.
3. Program Hubungan Industrial untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 97,72% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Pengesahan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 92,08% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 29,20% dengan Kategori Rendah, dengan kegiatan : Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 78,01% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 78,86% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 88,20% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat



Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka NOMOR : 188.46/050/DINAKERPERINDAG/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Perubahan Indikator kinerja utama di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka disebabkan terjadinya penyesuaian berdasarkan hasil asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Adapun capaian IKU Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Tahun 2023	Target akhir Renstra Kriteria	Capaian s/d 2022 terhadap target Renstra (%)
1.	Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	47,89	49,30	-	-	-	-	-
2.	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96,20	94,58	-	-	-	-	-
3.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah			31,57	30,11	32,15	32,15	94,77
4.	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	21,23	21,57	24,22	26,01	22,64	22,64	114,99
5.	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,17	13,08	12,29	13,13	14,68	14,68	90,49

Secara umum capaian kinerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022 1 (satu) indikator yang melebihi target dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinakerperindag 2019-2023.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinakerperindag sampai tahun 2022 dapat diukur secara keseluruhan, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Bangka**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>										
1.	<b>IKK OUTCOME</b>										
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten /Kota	100	2,97	1,66	1,68	100	2,97	1,66	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
1.1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten/kota		Mengidentifikasi /Membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
1.2	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja		Menghitung Selisih 6 (enam) Indiaktor Ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	75	66,67	-150	-140	75	66,67	-150	
1.3	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di kabupaten/Kota		Jumlah Seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
2.	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah Tenaga kerja Keseluruhan dikali 100%</b>	5,362	4,31	4,35	4,42	5,362	4,31	4,35	
2.1	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster		Jumlah Penerapan Program PBK kualifikasi KKNI atau akupasi pada tahun n dibagi Keseluruhan Program Pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Persentase Instruktur Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah Instruktur seluruhnya pada tahun n dikali 100%	10,34	10,345	10,35	10,35	10,34	10,345	10,35	
2.3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Jumlah instruktur pada tahun n dibagi Jumlah instruktur pada tahun n dikali 100%	0	0	0	96,60	0	0	0	
2.4	Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK pada tahun n dikali 100%	10	10	10	10	10	10	10	
2.5	Persentase LPK yang memiliki Perizinan		Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK yang terdata pada tahun n dikali 100%	0	60	60	60	0	60	60	
2.6	Jumlah Pengangguran yang dilatih		Sudah Cukup jelas	0	0	0	30	0	0	0	
2.7	Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan		Jumlah Lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n dibagi Jumlah orang yang dilatih pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Persentase Penyerapan Lulusan		Jumlah Lulusan yang bekerja pada tahun n dibagi Jumlah lulusan pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Persentase Lulusan Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah lulusan bersertifikat pef atih an oada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
2.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilatih dibagi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdaftar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
3	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi Jumlah Tenaga Kerja dikali 100%</b>	<b>66,00316</b>	<b>7,16</b>	<b>6,70</b>	<b>7,00</b>	<b>66,00316</b>	<b>7,16</b>	<b>6,70</b>	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
3.1	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah dikali 100	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Data Tingkat produktivitas Total		Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja	-100,73	92,3	-95,13	-93,30	-100,73	92,3	-95,13	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
4	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>		<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan pada tahun n Jumlah dikali 100</b>	<b>26,087</b>	<b>26,09</b>	<b>26,7</b>	<b>27,95</b>	<b>26,087</b>	<b>26,09</b>	<b>26,7</b>	
4.1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10orang atau lebih dikali 100%	23,65	25	25,68	25,70	23,65	25	25,68	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
4.2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	53,33	47,06	47,10	47,10	53,33	47,06	47,10	
4.3	Rekapitulasi tahunan jumlah Konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			20	22	26	26	20	22	26	
4.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur PKB pada tahun n dibagi jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	78,33	78,33	78,30	81,67	78,33	78,33	78,30	
4.5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor dikali 100%	69,57	69,57	70,2	70,80	69,57	69,57	70,2	
4.6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Jumlah Perusahaan yang berselisih dibagi jumlah Perusahaan pada tahun n dikali 100%	14,29	5,59	9,94	9,94	14,29	5,59	9,94	
4.7	Jumlah mogok kerja			0	0	0	0	0	0	0	
4.8	Jumlah penutupan Perusahaan			0	0	0	0	0	0	0	
4.9	Jumlah Perselisihan Kepentingan			0	0	1	0	0	0	1	
4.10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/PB) dalam 1 perusahaan			0	0		0	0	0		
4.11	Jumlah perselisihan PHK			3	11	12	11	3	11	13	
4.12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			74	78	30	78	74	78	29	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
4.13	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	0	0	0	0	0	0	
4.14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Jumlah Perjanjian Bersama dibagi Jumlah kasus Perselisihan dikali 100%	65,22	58,33	62,50	62,50	65,22	58,33	62,50	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar daerah) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari yang terdaftar dikali 100%	37,30	70,59	15,96	16,00	37,30	70,59	15,96	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
5.1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota			8	10	9	72	8	10	9	
5.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikab/kota			252	153	451	450	252	153	451	
5.3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayahkab/kota			3	3	3	3	3	3	3	
5.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	
5.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	3	2	2	0	3	2	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
5.6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	0	0	0	0	0	0	
5.7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			159	234	49	72	159	234	49	
5.8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			0	0	0	0	0	0	0	
5.9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Jumlah CPMI /CTKI yang mendapatkan Sosialisasi dibagi Jumlah CPMI/CTKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
5.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Jumlah CPMI /CTKI yang terdata dibagi Jumlah CPMI /CTKI dikali 100%	0	0	0	1	0	0	0	
5.11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Jumlah PMI /TKI yang dipulangkan dibagi Jumlah PMI yang pulang dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
5.12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Jumlah PMI /TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja dibagi Jumlah PMI/TKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>										
	<b>IKK OUTCOME</b>										
1	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri Kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	15,74	12,11	15,90	15,93	15,74	12,11	15,90	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
1.1	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasi nya di daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
2.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIP			96,51	90,49	94,94	95,00	96,51	90,49	94,94	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
2.1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA			62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	<b>IKK OUTCOME</b>										
3.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	100	13,62	6,09	20,00	100	13,62	6,09	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
3.2	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	100	94,26	89,42	90,00	100	94,26	89,42	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
4.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
4.1	Persentase Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8			10	11	12
	<b>IKK OUTCOME</b>										
5.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/Kota		Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
6.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini			85	105	125	100	85	105	125	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
6.1	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Kota di SIINas dibagi total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kecil di kabupaten kota di kali 100%	0,51	0,36	0,47	0,70	0,51	0,36	0,47	
	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>										
	<b>IKK OUTCOME</b>										
1.	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thnn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	<b>IKK OUTPUT</b>										
1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan										
	a. Pusat Perbelanjaan		Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan $\leq 5$ hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	b. Toko Swalayan		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan $\leq 5$ hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	100	26,09	100	100	100	26,09	100	
1.2	Persentase Penerbitan TDG		Jumlah penerbitan TDG $\leq 5$ hari kerja dibagi jumlah permohonan penerbitan TDG dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG		Jumlah Penerbitan TDG dibagi Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten Kota	8,57	22,67	10,71	10,80	8,57	22,67	10,71	
1.4	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk										
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq 2$ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0		0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thnn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq 2$ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	a. Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit $\leq 2$ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
.5	Persentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/Kota		Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten kota dibagi Jumlah permohonan SIUP bahan Berbahaya bagi pengecer dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Persentase Penerbitan SKA yang tepat waktu		Jumlah SKA yang terbit $\leq 1$ hari kerja (1 x 24 jam) dibagi Jumlah permohonan Penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Persentase Pengembangan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya		$K = (a - b) \times 100 \%$	24	24	75	75	24	24	75	
1.8	Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	-0,27	0,198	0,88	0,89	-0,27	0,198	0,88	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	<b>IKK OUTCOME</b>										
2.	Persentase kinerja Realisasi pupuk		Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	23,719	25,38	28,04	28,04	23,719	25,38	28,04	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
2.1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		$X = a (b \times c) \times 100\%$	0	0	28,04	28,04	0	0	28,04	
	<b>IKK OUTCOME</b>										
3.	Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/Kota dikali 100%	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	
	<b>IKK OUTPUT</b>										
3.1	Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Jumlah Total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	
3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan dikali 100%	0	0	0	20,00	0	0	0	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, beberapa isu isu strategis yang diperkirakan masih berpengaruh terhadap aktivitas tenaga kerja, industri dan perdagangan Kabupaten Bangka yaitu :

1. Rendahnya Kompetensi dan Kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri;
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;
9. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung;

10. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat;
11. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
12. Belum optimalnya pengembangan promosi hasil produk daerah;
13. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor;

Sedangkan terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dan SDM lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
2. Belum tersedianya Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) di Kabupaten Bangka;
3. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
4. Masih Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
5. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;



9. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
10. Lingkup layanan pengujian dan sertifikat yang masih sangat terbatas dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandarisasi sangat terbatas;
11. Adanya kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

### **Tantangan dan Peluang**

Beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinakerperindag ke depan antara lain :

- Pentingnya peran Dinakerperindag Kabupaten Bangka yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga terampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- Menyiapkan informasi lapangan kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka dan memberikan pelatihan kepada Pencaker;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi;
- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi selama tahun 2023, maka strategi pada tahun 2024 yang berupa rekomendasi dan catatan

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) beserta instrukturnya;
2. Meningkatkan pelatihan calon pekerja berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah;
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif anatar pekerja dan Perusahaan;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan agar patuh untuk menyampaikan data dan informasi industri melalui SIINAS;
6. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada IKM (Sertifikat Halal, HAACP dll) untuk meningkatkan Produk yang dihasilkan;
7. Meningkatkan pelaksanaan operasi Pasar di Kabupaten Bangka dan monitoring pemantauan harga dan stok barang dan barang strategis lainnya;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan;

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinakerperindag. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Program Kegiatan dan sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program Kegiatan dan sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,31	70.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,31	70.000.000	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,08	50.000.000			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,08	50.000.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	70.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	70.000.000	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	50.000.000	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	7.313.574.110			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	7.313.574.110	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	7.313.574.110	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	7.313.574.110	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan )	7.293.574.110	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan )	7.293.574.110	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	
			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,25	286.240.000			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,25	286.240.000	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	162.240.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	162.240.000	
			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	4.000.000			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	4.000.000	
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	120.000.000			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	120.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	162.240.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	162.240.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	4.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	4.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	120.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	120.000.000	
			<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>		<b>2.610.000.000</b>			<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>		<b>2.610.000.000</b>	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi umum di perangkat daerah	100	410.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi umum di perangkat daerah	100	410.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	

	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.00		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.200.000.000</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.200.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	250.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	250.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	200.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	200.000.000	
			<b>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>90</b>	<b>2.725.000.000</b>				<b>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>90</b>	<b>2.725.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>50</b>	<b>2.250.000.000</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>50</b>	<b>2.250.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	100.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit	150.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	2.000.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	2.000.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara</b>	<b>65</b>	<b>475.000.000</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara</b>	<b>65</b>	<b>475.000.000</b>	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil & 14 Motor	350.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil & 14 Motor	350.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	90.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	90.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	66,67	30.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	66,67	30.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTKD) yang disusun	50	30.000.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTKD) yang disusun	50	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	15.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	15.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	15.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang kompeten	53,3	441.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang kompeten	53,3	441.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	50	331.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	50	331.000.000	

	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	271.000.000		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	271.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	60.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	60.000.000	
	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Persentase LPKS yang dibina</b>	100	<b>55.000.000</b>		<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Persentase LPKS yang dibina</b>	100	<b>55.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	10 Lembaga	55.000.000		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	10 Lembaga	55.000.000	
	<b>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas</b>		<b>55.000.000</b>		<b>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas</b>		<b>55.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	55.000.000		Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	55.000.000	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</b>	<b>83</b>	<b>193.900.000</b>		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</b>	<b>83</b>	<b>193.900.000</b>	
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL</b>	<b>58,30</b>	<b>65.000.000</b>		<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL</b>	<b>58,30</b>	<b>65.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	70 orang	30.000.000		Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	70 orang	30.000.000	



	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan UL	10 orang	35.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 orang	35.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker</b>	25	<b>98.900.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker</b>	25	<b>98.900.000,00</b>	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	50 Pencaker dan 5 pemberi Kerja	30.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	50 Pencaker dan 5 pemberi Kerja	30.000.000	
	<b>Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja</b>	<b>20 Orang</b>	<b>68.900.000</b>	<b>Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja</b>	<b>20 Orang</b>	<b>68.900.000</b>	
	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Perpanjangan IMTA</b>	<b>57,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Perpanjangan IMTA</b>	<b>57,00</b>	<b>30.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 TKA	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 TKA	30.000.000	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan</b>	<b>46,50</b>	<b>210.000.000</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan</b>	<b>46,50</b>	<b>210.000.000</b>	

	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	86,90	70.000.000	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	86,90	70.000.000	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	40.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	30.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	30.000.000	
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	140.000.000	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	140.000.000	

	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan terselesaikan yang	16 Perkara	50.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan terselesaikan yang	16 Perkara	50.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	70.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	70.000.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM</b>	0,50	<b>1.090.000.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM</b>	0,50	<b>1.090.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	20	<b>1.090.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	20	<b>1.090.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	55.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	35.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	1.000.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	1.000.000.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS</b>	<b>25</b>	<b>55.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS</b>	<b>25</b>	<b>55.000.000</b>	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	20	55.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	20	55.000.000	

	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Peluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegritas dengan sistem OSS	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Peluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegritas dengan sistem OSS	1 Dokumen	25.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri & Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS</b>	<b>10</b>	<b>45.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS</b>	<b>10</b>	<b>45.000.000</b>	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	2	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	2	45.000.000	

	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan</b>	<b>85</b>	<b>45.000.000</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan</b>	<b>85</b>	<b>45.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang</b>	<b>80</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang</b>	<b>80</b>	<b>20.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan alkohol</b>	<b>40</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan alkohol</b>	<b>40</b>	<b>10.000.000</b>	

	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000		Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya</b>	<b>40</b>	<b>15.000.000</b>		<b>Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya</b>	<b>40</b>	<b>15.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000		Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase Sarana yang distribusi direvitalisasi</b>	<b>70</b>	<b>7.061.865.870</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase Sarana yang distribusi direvitalisasi</b>	<b>70</b>	<b>7.061.865.870</b>	
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>62,5</b>	<b>6.911.865.870</b>		<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>62,5</b>	<b>6.911.865.870</b>	

	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.911.865.870	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.911.865.870	
	<b>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	150.000.000	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar</b>	<b>90</b>	<b>210.000.000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar</b>	<b>90</b>	<b>210.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>85</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>85</b>	<b>110.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	



	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	50.000.000	
	<b>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>70</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>70</b>	<b>100.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang`</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 UMKM	70.000.000	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 UMKM	70.000.000	

	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri</b>	75	120.000.000	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri</b>	75	120.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	75	120.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	75	120.000.000	
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	70.000.000	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	70.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	50.000.000	
	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase Alat standar tera/tera ulang</b>	31,04	300.000.000	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase Alat standar tera/tera ulang</b>	31,04	300.000.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>		<b>Persentase UTP yang ditera/tera ulang</b>	71,51	300.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>		<b>Persentase UTP yang ditera/tera ulang</b>	71,51	300.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1250 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1250 Unit	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	150.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	150.000.000	
					<b>22.926.579.980</b>						<b>22.926.579.980</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasana forum OPD Kabupaten Bangka. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinakerperindag selaku OPD baik dari kelompok masyarakat dan Reses DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Adapun Program dan kegiatan yang diusulkan adalah :

**Tabel 2.11**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bangka**

#### **Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan**

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volum e	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembangunan Pasar Hiegenis	Kecamatan Puding Besar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	

### **BAB III**

#### **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2024 adaah sebagai berikut :

##### **Tema Pembangunan :**

**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan**

##### **Prioritas I**

**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

##### **Program Prioritas :**

- a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan peningkatan Energy Baru Terbarukan (EBT)
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi
- c. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- d. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
- e. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
- f. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**
- g. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri TKDN**
- h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

## **Prioritas II**

### **Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**

#### **Program Prioritas :**

- a. Pembangunan Wilayah Sumatera
- b. Pembangunan Wilayah Jawa bali
- c. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
- d. Pembanguna Wilayah Kalimantan
- e. Pembangunan Wilayah Sulawesi
- f. Pembangunan Wilayah Maluku
- g. Pembangunan Wilayah Papua

## **Prioritas III**

### **Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing**

#### **Program Prioritas :**

- a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- d. Peningkatan Pemertaan Layanan Pendidikan Berkualitas
- e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- f. Pengentasan Kemiskinan
- g. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

## **Prioritas IV**

### **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

#### **Program Prioritas :**

- a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
- b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

- c. Memperkuat Moderasi Beragama
- d. Meningkatkan Budaya Literasi, inovasi dan Kreativitas

#### **Prioritas V**

##### **Memperkuat Instruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan dasar**

###### **Program Prioritas :**

- a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
- b. Infrastruktur Ekonomi
- c. Infrastruktur Perkotaan
- d. Energi dan Ketenagalistrikan
- e. Transformasi Digital

#### **Prioritas VI**

##### **Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

###### **Program Prioritas :**

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Peningkatan Ketahanan bencana dan Iklim
- c. Pembangunan Rendah karbon

#### **Prioritas VII**

##### **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik**

###### **Program Prioritas :**

- a. Konsolidasi Demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar negeri
- c. Penegakan Hukum Nasional
- d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinakerperindag yaitu Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan, Dinakerperindag Kabupaten Bangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 pada **Prioritas I yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi, dan Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri TKDN.**

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka, maka tujuan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan;
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 1 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,37
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	62,37
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM		Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	12,39
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,32
.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,42
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,39
4.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Informasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,27
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74,70)



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
  1. Penyesuaian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
  2. Penyesuaian terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
  3. Penyesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan, antara lain meliputi :
1. Terdapat 14 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2024;
  2. Terdapat 28 kegiatan yang masing-masing mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024;
  3. Terdapat 55 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024;
  4. Total pagu kebutuhan dana/pagu dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum tahun 2024 sebesar Rp. 13.587.611.600,00
  5. Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bangka (8 Kecamatan).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinakerperindag Kabupaten Bangka disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinakerperindag Kabupaten Bangka direncanakan Tahun Anggaran 2024 ada 14 (Empat belas) Program, 28 (Dua puluh delapan) Kegiatan dan 55 (Lima puluh lima) Sub Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

##### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

**c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

**d. Kegiatan Administrasi Umum**

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
3. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**II. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

**III. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota.

**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

#### **IV. Program Penempatan Tenaga Kerja**

##### **Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

##### **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
2. Sub Kegiatan Job Fair/bursa kerja.

#### **V. Program Hubungan Industrial**

##### **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

##### **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non afiliasi;

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

## **VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

### **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan dan perwilayahan Industri;
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## **VII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

### **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.**

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/kota;
2. Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang berintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk base Approach (OSS RBA)

## **VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

### **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
2. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS.

## **IX. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

### **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.

### **Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

### **Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).



**X. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

**Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya**

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

**XI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang**

**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
2. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

## **XII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

## **XIII.PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

1. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;

## **XIV.Program Standarisasi Perlindungan Konsumen**

**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Lebih jelas Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinakerperindag Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 202**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Bangka**

**Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.736.751.600,00				10.371.000.000,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		25,31				25,59	140.000.000,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		11,08	-			11,12	-
2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar		100	90.000.000,00			100	140.000.000,00

		<b>Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
2.07.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dokumen	50.000.000,00	APBD		13 Dokumen	80.000.000,00
2.07.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14 Dokumen	40.000.000,00	APBD		14 Dokumen	60.000.000,00
		<b>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</b>		<b>0%</b>				<b>0%</b>	<b>6.530.000.000,00</b>
2.07.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</b>		<b>100</b>	<b>6.520.000.000,00</b>			<b>100</b>	<b>6.530.000.000,00</b>
2.07.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	6.500.000.000,00	APBD		49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	6.500.000.000,00
2.07.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	10.000.000,00	APBD		12 Dokumen	15.000.000,00
2.07.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		42 Dokumen	10.000.000,00	APBD		42 Dokumen	15.000.000,00

		<b>Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>		64,25				64,55	
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap</b>		<b>100</b>	<b>68.000.000,00</b>			<b>100</b>	<b>205.000.000,00</b>
		<b>Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>		<b>50</b>				<b>50</b>	
2.07.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Bangka	1 paket	15.000.000,00	APBD		1 paket	50.000.000,00
2.07.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bangka	11 Dokumen	3.000.000,00	APBD		11 Dokumen	5.000.000,00
2.07.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Bangka	10 orang ( 5 orang Laki-laki & 5 orang Perempuan)	50.000.000,00	APBD		49 orang ( 24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	150.000.000,00
		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>		<b>3</b>				<b>4</b>	<b>2.931.000.000,00</b>
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>374.611.600,00</b>			<b>100</b>	<b>511.000.000,00</b>
2.07.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bangka	12 Laporan	366.611.600,00	APBD		12 Laporan	500.000.000,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bangka	12 Dokumen	4.000.000,00	APBD		12 Dokumen	7.000.000,00

2.07.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bangka	12 Dokumen	4.000.000,00	APBD		12 Dokumen	4.000.000,00
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1.330.000.000,00</b>			<b>100</b>	<b>2.420.000.000,00</b>
2.07.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bangka	12 Laporan	1.060.000.000,00	APBD		12 Laporan	1.900.000.000,00
2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	Kab Bangka	12 Laporan	120.000.000,00	APBD		12 Laporan	270.000.000,00
2.07.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Bangka	12 Laporan	150.000.000,00	APBD		12 Laporan	250.000.000,00
		<b>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</b>		<b>90</b>	<b>354.140.000,00</b>			<b>90</b>	<b>565.000.000,00</b>
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penambahan aset perangkat daerah</b>		<b>50</b>	<b>110.000.000,00</b>			<b>50</b>	<b>80.000.000,00</b>
2.07.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab Bangka	1 Paket	25.000.000,00	APBD		1 Paket	40.000.000,00
2.07.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab Bangka	30 Unit	85.000.000,00	APBD		40 Unit	40.000.000,00
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara</b>		<b>65</b>	<b>244.140.000,00</b>			<b>70</b>	<b>485.000.000,00</b>

2.07.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Bangka	4 Mobil &14 Motor	164.140.000,00	APBD		4 Mobil &14 Motor	400.000.000,00
2.07.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab Bangka	30 unit	35.000.000,00	APBD		30 unit	40.000.000,00
2.07.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab Bangka	1 Unit	45.000.000,00	APBD		1 Unit	45.000.000,00
2.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>				20.000.000,00				30.000.000,00
		<b>Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah</b>		66				77	
2.07.02.2.01	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTKD) yang disusun</b>		50	20.000.000,00			100	30.000.000,00
2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab Bangka	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		-	15.000.000,00
2.07.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab Bangka	20 orang	10.000.000,00	APBD		6 Perusahaan	15.000.000,00
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				270.000.000,00				270.000.000,00
		<b>Persentase Pencari Kerja yang kompeten</b>		53,3				56	

<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan</b>		<b>50</b>	<b>230.000.000,00</b>			<b>53,85</b>	<b>230.000.000,00</b>
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Bangka	60 Orang	180.000.000,00	APBD		70 orang	180.000.000,00
2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Bangka	1 unit	50.000.000,00	APBD		1 unit	50.000.000,00
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase LPKS yang dibina</b>		<b>100</b>	<b>20.000.000,00</b>			<b>100</b>	<b>20.000.000,00</b>
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Kab Bangka	10 Lembaga	20.000.000,00	APBD		15 Lembaga	20.000.000,00
<b>2.07.03.2.04</b>	<b>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas</b>		<b>10%</b>	<b>20.000.000,00</b>				<b>20.000.000,00</b>
2.07.03.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kab Bangka	10 Perusahaan	20.000.000,00	APBD		15 Perusahaan	20.000.000,00
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				<b>150.000.000,00</b>				<b>120.000.000,00</b>
		<b>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</b>		<b>83</b>				<b>92</b>	
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL		58,30	60.000.000,00			57,6	60.000.000,00



2.07.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab Bangka	70 orang	30.000.000,00	APBD		75 orang	30.000.000,00
2.07.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab Bangka	10 orang	30.000.000,00	APBD		15 orang	30.000.000,00
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari		25	90.000.000,00			29	60.000.000,00
2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	Kab Bangka	70 Pencaker dan 5 pemberi Kerja	60.000.000,00	APBD		60 Pencaker dan 10 pemberi Kerja	30.000.000,00
2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kab Bangka	20 Orang	30.000.000,00	APBD		30 Orang	30.000.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				175.000.000,00				180.000.000,00
		Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan		46,50				47,77	
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		86,90	55.000.000,00			91,46	60.000.000,00

2.07.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	Kab Bangka	10 Perusahaan	25.000.000,00	APBD		10 Perusahaan	25.000.000,00
2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Bangka	1 Laporan (20 Perusahaan)	30.000.000,00	APBD		1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000,00
2.07.05.2.02	<b>Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</b>		<b>62,5</b>	<b>120.000.000,00</b>			<b>62,5</b>	<b>120.000.000,00</b>
2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab Bangka	16 Perkara	40.000.000,00	APBD		16 Perkara	40.000.000,00
2.07.05.2.02.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kab Bangka	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000,00	APBD		1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000,00

2.07.05.2.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kab Bangka	1 Lembaga	60.000.000,00	APBD		1 Lembaga	60.000.000,00
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				420.000.000,00				1.220.000.000,00
		Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM		0,50	420.000.000,00			0,70	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		20	420.000.000,00			25	1.220.000.000,00
3.31.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	Kab Bangka	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD		1 Dokumen	75.000.000,00
3.31.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	Kab Bangka	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		1 Dokumen	45.000.000,00
3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	Kab Bangka	1 Dokumen	350.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.100.000.000,00

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				40.000.000,00				62.000.000,00
		Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS		25				30	
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri		20	40.000.000,00			30	62.000.000,00
3.31.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bangka	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	32.000.000,00

3.31.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab Bangka	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	30.000.000,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.000.000,00				49.000.000,00
		Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS		10				15	
3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS		2	45.000.000,00			4	49.000.000,00

3.31.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Insormasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab Bangka	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	17.000.000,00
3.31.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam peyampaian data ke SIINAS	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam penyampaian data SIINAS	Kab Bangka	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		1 Dokumen	32.000.000,00
3.30.02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>				45.000.000,00				45.000.000,00
		<b>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan</b>		<b>70</b>				<b>75</b>	
3.30.02.2.02	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang</b>		<b>70</b>	<b>20.000.000,00</b>			<b>80</b>	<b>20.000.000,00</b>
3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab Bangka	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
3.30.02.2.05	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkhohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan alkohol</b>		<b>25</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>40</b>	<b>10.000.000,00</b>

3.30.02.2.05.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Bangka	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.02.2.06	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya		40	15.000.000,00			40	15.000.000,00
3.30.02.2.06.03	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab Bangka	1 Jilid Laporan	15.000.000,00	APBD		1 Jilid Laporan	15.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.080.449.245,00				3.180.000.000,00
		Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi		70				70	
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		62,5	3.000.449.245,00			75	3.100.000.000,00

3.30.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Bangka	1 unit	100.000.000,00	APBD		1 unit	100.000.000,00
3.30.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Bangka	1 unit	2.900.449.245,00	APBD		1 unit	3.000.000.000,00
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		100	80.000.000,00			100	80.000.000,00
3.30.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab Bangka	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD		1 Dokumen	80.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				170.000.000,00				200.000.000,00
		Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar		90				90	
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting		85	100.000.000,00			90	100.000.000,00
3.30.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab Bangka	12 Laporan	60.000.000,00	APBD		12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000,00



3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab Bangka	5 laporan	40.000.000,00	APBD		5 laporan	40.000.000,00
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida		70	70.000.000,00			75	100.000.000,00
3.30.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab Bangka	12 laporan	35.000.000,00	APBD		12 laporan	50.000.000,00
3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Kab Bangka	12 laporan	35.000.000,00	APBD		12 laporan	50.000.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.000.000,00				70.000.000,00
		Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang		100				100	
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan		100	60.000.000,00			100	70.000.000,00
3.30.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab Bangka	7 Pelaku Usaha	60.000.000,00	APBD		7 UMKM	70.000.000,00

3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				95.000.000,00				95.000.000,00
		Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri		75				75	
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		75	95.000.000,00			75	95.000.000,00
3.30.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	Kab Bangka	50 UMKM	95.000.000,00	APBD		30 UMKM	95.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				280.410.755,00				150.000.000,00
		Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan		31,04				39,29	
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera/tera ulang		71,51	280.410.755,00			85,81	150.000.000,00
3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab Bangka	1250 Unit	245.410.755,00	APBD		1500 Unit	110.000.000,00
3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	Kab Bangka	500 orang	35.000.000,00	APBD		500 orang	40.000.000,00
JUMLAH					13.587.611.600,00				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 disusun mengacu kepada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 yang selanjutnya dimutakhirkan dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur untuk perencanaan dan penganggaran berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 melalui pelaksanaan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 15.737.611.600 (Lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024 yang mengharuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala;
4. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 mencakup:

1. Penyusunan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dengan mengacu kepada Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024;
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, 1 Agustus 2023

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja, Perindustrian dan  
Perdagangan  
Kabupaten Bangka,



**Drs. H. ASEP SETIAWAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670504 199403 1 013

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl.Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka,  
Kode Pos 33215 ☎ (0717)-92522 Fax. (0717)-92522

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.45/133 /DINAKERPERINDAG/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ;
  - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024;
  - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
  - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

/

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 6 Desember 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Bangka,



**Drs. H. ASEP SETIAWAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670504 199403 1 013**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 188.45/233 /DINAKERPERINDAG/2022  
TANGGAL : 6 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTURAL</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
5.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Staf pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 6 Desember 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Bangka,



**Drs. H. ASEP SETIAWAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670504 199403 1 013**

**JADWAL TENTATIF**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renja PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2024	6 Desember 2022 - 31 Januari 2023	
3	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	9-31 Januari 2023	
4	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	6-9 Februari 2023	
5	SE Bupati tentang Penyempurnaan Ranwal Renja-PD	14 Februari 2023	
6	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	14 Februari- 9 Maret 2023	
7	Forum Lintas Perangkat Daerah	21-22 Februari 2023	
8	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	6-9 Maret 2023	
9	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	13-15 Maret 2023	
10	Penetapan Perbup tentang RKPD Kabupaten Bangka	3 Juli 2023	
11	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2023	
12	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	5-12 Juli 2023	
13	Verifikasi Ranhir Renja PD	6-26 Juli 2023	
14	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	27-28 Juli 2023	
15	Penyampaian seluruh Ranhir Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perkada	31 Juli 2023	
16	Penetapan Perkada tentang Renja PD Tahun 2024	1 Agustus 2023	